

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mengungkap jejak perempuan sesungguhnya merupakan usaha menapaki lorong sebuah zaman. Ia tercermin dari jejak sebuah bangsa dengan sistem sosial dan pergulatan ideologi, politik dan kebijakan yang diterapkan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Melalui pendidikan, organisasi, mereka berusaha mengabdikan dirinya pada agama dan bangsanya. Kaum perempuan sadar betul akan arti kehidupan karena mereka tahu sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya memberi manfaat pada sesama.

Perempuan sepanjang zaman telah memperoleh perhatian dari para cendekiawan dan para peneliti sesuai dengan kecenderungan dan bidang mereka masing-masing. Hanya saja kajian dan penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga berbeda pula dalam menjabarkan hak dan kewajibannya. Sebahagian kajian mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki tetapi kajian lainnya menjatuhkan perempuan dengan suatu kesimpulan bahwa perempuan diciptakan untuk kemaslahatan laki-laki. Ketika sebagian undang-undang memberikan hak kepada perempuan maka undang-undang lainnya menghalangi hak perempuan, sehingga nasib perempuan seolah-olah tergadaikan oleh kekuasaan laki-laki dan terabaikan dengan kehendak laki-laki.

Senada dengan pandangan diatas, Eti Nurhayati menegaskan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis membawa implikasi yang berbeda baik dalam wacana maupun fenomena di masyarakat. Dalam wacana, kesetaraan perempuan *vis a vis* laki-laki, masih menimbulkan kontroversi dikalangan para intelektual. Demikian pula dalam fenomena sosio-kultural, laki-laki masih dominan memegang kendali kekuasaan, dimana kekuasaan dan kebijakan yang diberlakukannya hanya berdasarkan standar laki-laki.

Dikotomi peran mengakibatkan perempuan termarginalkan. Mereka harus terkungkung oleh keempat dinding rumahnya sendiri, dan pada saat yang sama laki-laki bebas berkiperah seluas akses yang dapat dijangkaunya. Celakanya, diamnya mereka di rumah dengan aneka urusan kerumahtangaan dipandang sebagai kewajiban, sehingga tidak pernah dinilai sebagai kerja produktif secara ekonomis yang membutuhkan perhitungan jam kerja dengan imbalan yang sesuai. Kemudian, dengan dalih sebagai pemimpin, tidak kurang suami berlaku sewenangwenang terhadap isterinya, bahkan sampai pada tindakan yang dapat dimasukkan dalam kotak “tindak pidana kekerasan”.

Gambaran umum mengenai posisi dan kedudukan perempuan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal itu antara lain dapat dilihat dari GBHN 1999-2004 yang mengakui secara gamblang terjadinya subordinatif. Dengan ungkapan lain, negara sendiri mengakui adanya ketimpangan gender dan indikator dari ketimpangan gender tersebut tercermin, terutama pada kualitas hidup perempuan Indonesia, yang menduduki peringkat paling

rendah di ASEAN. Indikator rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia akibat ketimpangan gender terlihat jelas pada beberapa aspek yakni aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek HAM (hak asasi manusia) dan aspek politik.

Kiprah perempuan tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang, ia harus dilihat kepada pandangan dasar agama tentang peranan utama setiap insan di dunia ini. Setiap peradaban menciptakan hukum sesuai pandangan dasarnya tentang wujud alam dan manusia. Setiap peradaban membandingkan sekian banyak nilai kemudian memilih atau menciptakan apa yang dinilainya terbaik. Karena itu merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum syara' yang bersifat juz'iy dengan pandangan dasarnya yang bersifat menyeluruh. Menafsirkan suatu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia, laki-laki dan perempuan pasti akan menjerumuskan dalam kesalahpahaman penilaian, dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan.

“Perempuan tidak menjadi pemimpin itu karena salah perempuan sendiri, tidak secerdas laki-laki”. Berdasarkan analisis filsafat Freire, yang demikian ini merupakan pandangan kaum fungsionalism yang menggunakan cara berfikir naif. Padahal saat ini sudah sepatutnya menggunakan cara berfikir kritis, bahwa perempuan tidak menjadi pemimpin, bukan salah perempuan tetapi karena tidak ada sistem pengkaderan yang mendukung

perempuan untuk mampu memimpin, disamping sistem pemilihannya yang tidak fair.

Oleh karena itu, dengan kemajuan yang semakin hari semakin pesat, seorang perempuan hendaknya benar-benar mempersiapkan diri untuk mampu memimpin. Jika perempuan memiliki wawasan kognitif yang luas, kapabilitas, pengalaman, kewibawaan, i'tikad yang baik, serta masyarakat mau menerima perempuan sebagai pemimpin, maka sudah saatnya memberi *support* kepada mereka untuk menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. Realitas sosial membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang berhasil dalam menjalankan tugas yang selama ini dianggap sebagai tugas laki-laki. Realitas sosial membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang sukses dalam kepemimpinannya, baik dalam lingkup domestik maupun publik.

Penelitian membuktikan bahwa 54,2 % dari angka 100% seorang perempuan memerankan diri sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakteristik visioner. Sementara itu dalam pembangunan budaya sekolah, temuan menunjukkan bahwa 66,3% keterlibatan perempuan dalam membangun budaya sekolah. Hal ini membuktikan bahwa kiprah perempuan dalam kepemimpinan di lembaga pendidikan tidak diragukan lagi.

Kemajuan teknologi sebagai tanda dari globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi, manusia yang bijak adalah manusia yang mampu merespon serta mengimbangi kemajuan tersebut dengan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan sehingga tidak terlindas oleh kemajuan tersebut. Kepala

sekolah merupakan unsur yang sangat penting serta ujung tombak dalam sebuah lembaga pendidikan, ia mempunyai peranan strategis baik dalam perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi dari sebuah kebijakan demi pencapaian tujuan pendidikan, untuk itu dibutuhkan kualifikasi khusus untuk menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan agar supaya kebijakannya sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan lokal maupun tujuan nasional.

Kebijakan yang dikutip oleh Subarsono, menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas dan didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah Negara. Namun ketika konsep ini kita tarik pada tataran lembaga pendidikan maka kebijakan dapat dipahami sebagai apapun pilihan pihak sekolah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa pertama sebuah kebijakan dibuat dan dirumuskan oleh pihak sekolah, kedua kebijakan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan-badan yang ada di lembaga pendidikan.

Kebijakan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah lembaga pendidikan, karena menyangkut kepentingan warga dalam lembaga pendidikan tersebut. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami terminasi karena gagal mencapai maksud dan tujuan. Dilihat dari vitalitas sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut hendaknya dirumuskan melalui beberapa tahap yaitu: tahap perumusan masalah/penyusunan agenda,

tahap *forecasting*/formulasi kebijakan, tahap rekomendasi kebijakan/adopsi kebijakan, tahap *monitoring* kebijakan/implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan/penilaian kebijakan.

Dalam menentukan kebijakan, berkaitan erat dengan visi dan misi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan, mengembangkan kebijakan operasional sekolah, menyusun laporan, menyusun program kurikulum, menyusun program sumber daya manusia/tenaga kependidikan, menyusun program sarana prasarana, menyusun program keuangan, menyusun program hubungan masyarakat

Sudah kita ketahui bahwa SMK N 2 Boyolangu memiliki banyak prestasi yang telah dicapai, baik ditingkat kabupaten provinsi maupun nasional. Salah satunya menjadi sekolah Adiwiyata mandiri. Selain itu juga banyak mendapatkan prestasi dibidang akademik dan profesi / kejuruan. Khususnya dibawah kepemimpinan Ibu Agustin. UPTD SMKN 2 Boyolangu merupakan salah satu lembaga diklat berstandar Nasional yang berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tamatan atau calon tenaga kerja yang mempunyai pribadi unggul yang mandiri, profesional, berimtaq dan berbudaya lingkungan di era global. Yang mana di Tulungagung ini satu-satunya sekolah yang bisa mengeluarkan sertifikat profesi. Yang akan digunakan dalam mempersiapkan siswa menghadapi MEA. Dan sertifikat profesi ini akan bisa dikeluarkan mulai tahun 2016. Secara akademis seluruh siswa 100% lulus pada ujian nasional

Madrasah Aliyah Al Ma'arif yang berada di pusat kota Tulungagung, dilingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam mengembangkan pendidikan yang memadukan keunggulan antara keimanan, keilmuan dan amal, juga memacu prestasi akademik dan non akademik sebagaimana visi Madrasah Aliyah Al Ma'arif. Yang saat ini dipimpin oleh Dra Hj Luthfi Su'aidah M.Ag.

Secara akademis, seluruh siswa Madrasah Aliyah Al Ma'arif yang mengikuti Ujian Nasional telah berhasil lulus 100 %, mengembangkan budaya agamis dengan kegiatan seperti tadarus sebelum pelajaran dimulai, sholat dhuha bersama-sama di mushola yang diteruskan dengan kultum, mengembangkan *on the job training* dengan memberikan pendidikan *life skill* di tempat-tempat tertentu untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa seperti, mengajar TPQ, bengkel, tata rias dan lain-lain. Secara non akademis para siswa dilibatkan kegiatan ekstra kurikuler seperti drumband, pramuka, MTQ, dan English camp. Dan juga memiliki banyak prestasi yang dicapai siswa di tingkat kabupaten dan provinsi. Yaitu lomba pidato bahasa arab, bahasa inggris, penyiar radio, olimpiade matematika, seni beladiri, olimpiade bahasa inggris, Gita Pati, Paramanandi, MTQ.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengaji lebih dalam kiprah perempuan dalam kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjawab semua persoalan tersebut, penulis ingin meneliti tentang **“KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN DALAM**

MENENTUKAN KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Multi Kasus di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan dalam konteks penelitian diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada aspek kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan. MA al-Ma'arif Tulungagung

2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana formulasi kebijakan kepala sekolah perempuan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah perempuan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung?
- c. Bagaimana evaluasi kebijakan kepala sekolah perempuan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung?
- d. Bagaimana psikologi kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui formulasi kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung.
2. Untuk mengetahui implementasi kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung.
3. Untuk mengetahui evaluasi kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung.
4. Untuk mengetahui psikologi kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian berjudul “Kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan” ini akan memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi perempuan dalam memimpin lembaga pendidikan serta mampu menambah khazanah keilmuan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu lembaga di masa yang akan datang.
- b. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang aspek lain dari Kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan.
- c. Bagi pembaca, dapat dijadikan gambaran tentang Kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan.
- d. Bagi perpustakaan pascasarjana IAIN Tulungagung, dapat dijadikan pijakan dalam desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif khususnya yang berkenaan dengan penelitian tentang Kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin suatu sekolah/madrasah.

b. Perempuan

Perempuan merupakan terminology yang masuk dalam diskursus gender. Sehingga perempuan dalam konteks gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Perempuan disini bukan dilihat dari jenis kelamin biologisnya, namun konsepsi sosial-kultural masyarakat dalam peran, perilaku, kemampuan dan psikologis perempuan.

c. Kebijakan

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

d. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang di beli oleh para konsumen.

2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan adalah bagaimana seorang kepala sekolah perempuan melakukan menyusun formulasi, melaksanakan implementasi dan melakukan evaluasi kebijakan, dan bagaimana psikologi kepala sekolah perempuan sebagai seorang pimpinan tertinggi dalam mengambil tindakan ataupun langkah yang berani untuk menentukan kebijakan lembaga di SMKN 2 Boyolangu dan MA Al Ma'arif Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal berisi sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak yang memuat tentang uraian singkat yang dibahas dalam tesis.

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab pendahuluan, pertama-tama dipaparkan konteks penelitian yang mengungkapkan berbagai permasalahan yang diteliti sehingga diketahui hal-hal yang melandasi munculnya fokus penelitian yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu proses penelitian. Dalam bab ini, tujuan merupakan arah yang akan dituju dalam penelitian kemudian

dilanjutkan kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya penegasan istilah secara konseptual dan operasional. Yang terakhir pada bab ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang berkenaan pembahasan teori-teori yang digunakan untuk mengkaji : Kepemimpinan kepala sekolah perempuan: kepemimpinan, faktor yang memperkuat potenssi kepemimpinan perempuan, faktor yang memperlemah potenssi kepemimpinan perempuan; Wawasan jender dalam pendidikan: pengertian jender, teori-teori jender, jender dalam perspektif islam, bias psikologi perempuan; kebijakan, pengertian kebijakan pendidikan, tahap-tahap kebijakan yang terdiri dari: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan; karakteristik kebijakan pendidikan ; analisis kebijakan; lembaga pendidikan, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian. Selanjutnya dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang mana bisa melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode yang akan digunakan dalam penelitian, dimana pembahasannya meliputi: Rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; Kehadiran peneliti; Lokasi penelitian; Sumber data; teknik pengumpulan data; Teknik analisis data, dan Pengecekan keabsahan data.

Bab keempat berisi tentang paparan data yaitu Formulasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Implementasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Evaluasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Psikologi kepala SMKN 2 Boyolangu dalam menentukan kebijakan, serta temuan-temuan : Formulasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Implementasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Evaluasi kebijakan kepala SMKN 2 Boyolangu, Psikologi kepala SMKN 2 Boyolangu dalam menentukan kebijakan beserta paparan data yaitu Formulasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Implementasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Evaluasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Psikologi kepala MA Al Ma'arif Tulungagung dalam menentukan kebijakan, serta temuan-temuan : Formulasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Implementasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Evaluasi kebijakan kepala MA Al Ma'arif Tulungagung, Psikologi kepala MA Al Ma'arif Tulungagung dalam menentukan kebijakan beserta analisis data.

Bab kelima berisi tentang pembahasan hasil temuan secara mendalam sehingga ditemukan hasil yang sesuai.

Bab keenam berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan yang menampakkan konsistensi terkait dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, penyajian dan analisis data serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

Bagian akhir memuat daftar rujukan yang merupakan daftar buku yang menjadi referensi oleh peneliti. Kemudian, diberikan juga lampiran-

lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian. Pada bagian paling akhir ditutup dengan biodata penulis yang menjelaskan biografi peneliti secara lengkap.